BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Analisis Masalah

Proses pemindahbukuakan dalam sistem informasi Direktorat Jendral Pajak yang tersentralisasi di Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak menimbulkan beberapa masalah, diantaranya adalah jika beban kerja sistem tinggi yaitu dengan banyaknya pegawai dari berbagai kantor pajak mengakases Sistem Informasi Pemindahbukuan ini maka akan menyebabkan akses ke dalam sistem informasi menjadi lambat dikarenakan terhubung dengan jaringan intranet yang mempunyai bandwidth kecil.

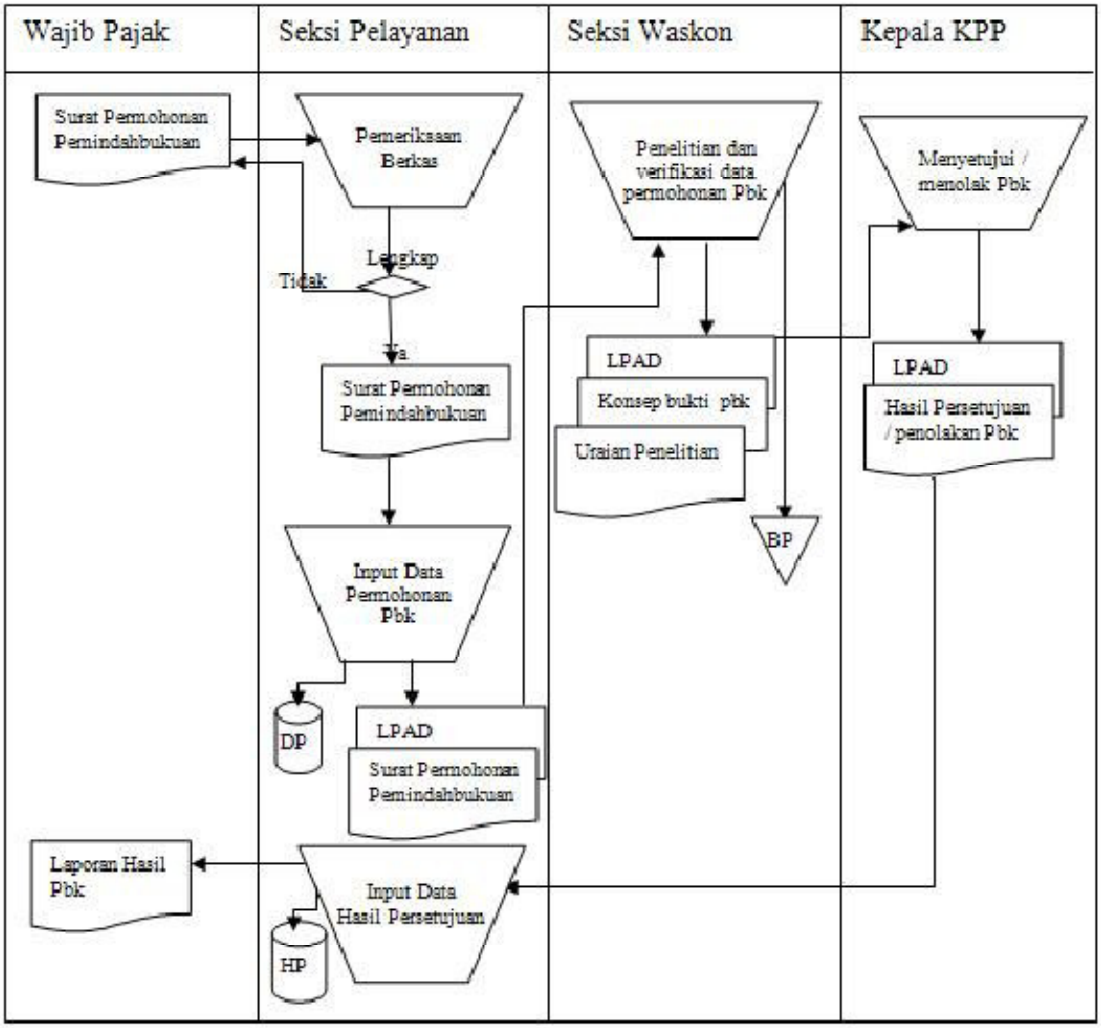
Jika Sistem Informasi Pemaindahbukuan ini tidak dapat diakses oleh pegawai maka proses pekerjaan pemindahbukuan menjadi terlambat sedangkan proses-proses pemindahbukuan dibatasi hanya selama 30 hari.

3.2 Analisis Prosedur Yang Berjalan

Prosedur yang berjalan pada proses pemindahbukuan di Kantor Pelayan Pajak Pratama Sumedang saat ini adalah :

1. Wajib Pajak (WP) mengajukan surat permohonan pemindahbukuan kebagian pelayanan.
2. Seksi Pelayanan memeriksa surat permohonan pemindahbukuan dan memberikan bukti penerimaan surat (BPS) permohonan pemindahbukuan pada WP.
3. Seksi Pelayanan menginputkan data permohonan pemindahbukuan dari WP ke sistem untuk diteruskan kepada seksi pengawasan dan konseling (Waskon) terkait bersama berkas surat permohonan pemindahbukuan dan lembar pengawas arus data (LPAD).
4. Seksi Pengawasan dan Konseling (Waskon) kemudian menganalisis surat permohonan pemindahbukuan dan membuat konsep bukti pemindahbukuan untuk disetujui oleh Kepala Kantor Pajak.

5. Seksi Waskon membuat uraian hasil penelitian pemindahbukuan untuk disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
6. Seksi Waskon meneruskan berkas konsep bukti pemindahbukuan dan uraian penelitian pemindahbukuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk disetujui atau ditolak.
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan pemindahbukuan yang diajukan oleh wajib pajak dan meneruskan kepada seksi Waskon kembali.
8. Seksi Waskon menginputkan hasil persetujuan dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak kedalam sistem dan mencetak bukti pemindahbukuan untuk diteruskan kepada wajib pajak. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada flowmap 3.1



Gambar 3.1 Flowmap Sistem Pemindahbukuan Pajak

Keterangan :

LPAD : Lembar Pengawasan Arus Dokumen

DP : Data Pemohon

BP : Berkas Permohonan

HP : Hasil Permohonan

Waskon : Pengawasan dan konseling

3.3 Analisis Pengkodean

Dalam sistem informasi pemindahbukuan ini menggunakan beberapa kode.

No	Kode	Keterangan
1	Surat_Permohonan_Pbk	Surat permhonan pemindahbukuan dari wajib pajak
2	Surat_Permonhonan_PBK_Ver	Kode berkas hasil verifikasi
3	LPAD_Ver	Kode pengantar berkas berkas hasil verifikasi
4	Hasil_Persetujuan_Pbk	Kode bukti persetujuan pemindahbukuan
5	D_LPAD	Kode bukti lembar pengawasan arus data
6	D_Permohonan	Kode data bukti permohonan
7	D_Pbk	Kode data pemindahbukuan

Tabel. 3.1 Kode Sistem Informasi Pemindahbukuan

3.4 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Dalam sub bab analisis kebutuhan non fungsional ini akan dijelaskan mengenai spesifikasi *hardware, software* dan *brainware* pada sistem yang sedang berjalan, kebutuhan sistem, dan evaluasi untuk menjalankan sistem informasi ini.

3.4.1 Analisis *Hardware*

a. Spesifikasi hardware pada sistem yang berjalan

1) Processor : Intel ® Pentium ® D CPU 3.40GHz – 3.39Ghz

2) Monitor : IBM Lenovo ThinkVision

3) Mouse : Usb Mouse IBM

4) Ram : 504 MB

5) HardDisk : 80 GB

6) Keyboard : Usb Keyboard IBM

7) Printer : Hp Laser Jet 2420

b. Kebutuhan spesifikasi hardware

1) Processor : Intel®Pentium®D CPU 3.40GHz–3.39Ghz

2) Monitor : IBM Lenovo ThinkVision

3) Mouse : Usb Mouse IBM

4) Ram : 1024 MB

5) *Space* HardDisk : 20 GB

6) Keyboard : Usb Keyboard IBM

7) Printer : Hp Laser Jet 2420

c. Evaluasi

Hardware yang digunakan pada saat ini sudah cukup baik, namun perlu perawatan dan perbaikan pada beberapa komputer yang rusak agar tidak mengganggu kinerja proses sistem informasi pemindahbukuan. Selain itu RAM perlu untuk ditambah kapasitasnya untuk mempercepat kinerja komputer.

3.4.2 Analisis *Software*

a. Spesifikasi *software* yang digunakan pada sistem yang berjalan saat ini.

1) Microsoft Windows Xp Proffesional Version 2002 SP 2

2) SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak)

3) Microsoft Office 2003

b. Spesifikasi *Software* yang dibutuhkan untuk menjalankan Sistem Informasi Pemindahbukuan.

1) Microsoft Windows Xp Proffesional Version 2002 SP 2

2) SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak)

3) Microsoft Office 2007

c. Evaluasi

Software yang digunakan saat ini masih cukup baik untuk menjalankan Sistem Informasi Pemindahbukuan ini tetapi Microsoft Office 2003 perlu diganti dengan Microsoft Office 2007 hal ini dikarenakan beberapa file dari wajib pajak yang

berekstensi .docx, .xlsx maupun .pptx tidak dapat dijalankan pada microsoft office 2007.

3.4.3 Analisis Pengguna (*Brainware*)

a. *Brainware* pada sistem yang berjalan

Untuk mengoperasikan atau proses pengolahan data, setiap pegawai memiliki user dan password sesuai dengan nomor induk pegawai (NIP) masing-masing dan memperoleh menu pada Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak yang berbeda sesuai seksi dimana pegawai tersebut di tempatkan.

Status : PNS Kementerian Keuangan

Pendidikan Minimal : D1

b. *Brainware* yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem

Sistem yang berjalan membutuhkan pegawai yang telah memperoleh pelatihan penggunaan sistem informasi pemindahbukuan.

Status : PNS Kementerian Keuangan

Pendidikan Minimal : D1

Telah mengikuti pelatihan Sistem Sistem Informasi Pemindahbukuan.

c. Evaluasi *Brainware*

Sistem informasi pemindahbukuan ini adalah sistem yang baru berjalan dibeberapa Kantor Pelayanan Pajak saja, sehingga para pegawai belum begitu familiar. Untuk itu sosialisasi dan pelatihan sangat diperlukan untuk menunjang proses pemindahbukuan.

3.4.4 Analisis Jaringan

a. Jaringan pada sistem berjalan

Jaringan yang digunakan untuk Sistem Informasi Pemindahbukuan ini menggunakan jaringan intranet SIDJP dengan kecepatan akses 256 Kbps. Jaringan intranet menggunakan router yang terhubung dengan jaringan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak Pusat.

b. Kebutuhan Jaringan

Jaringan intranet yang dibutuhkan untuk menjalankan untuk menjalankan sistem Informasi Pemindahbukuan ini agar berjalan dengan baik adalah 512 Kbps.

c. Evaluasi

Peningkatan kecepatan akses intranet ini untuk mempercepat proses pemindahbukuan disaat beban kerja meningkat di seluruh kantor Pelayanan Pajak Pratama.

3.5 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional seperti analisis masukan, analisis proses, analisis keluaran, diagram kontek, diagram level nol, diagram level satu pada sistem informasi ini akan dijelasakan pada sub bab berikut.

3.5.1 Analisis Masukan

Data yang masuk adalah sebagai berikut :

1. Nama Masukan : Surat_Permohonan_Pbk
   - Fungsi : Permohonan Pemindahbukuan
   - Sumber : Wajib Pajak.
   - Media : Kertas.
   - Rangkap : 1 (satu) lembar
   - Frekuensi : Setiap Permohonan Pemindahbukuan
   - Keterangan : Data Permohonan Pemindahbukuan
2. Nama Masukan : Surat_Permohonan_Pbk_Ver
   - Fungsi : Sebagai berkas hasil verifikasi Pbk untuk diproses dan disetujui.
   - Sumber : Waskon
   - Media : Kertas.
   - Rangkap : 1 (dua) lembar
   - Frekuensi : Setiap Penelitian
   - Keterangan : Dokumen hasil verifikasi berkas permohonan Pbk untuk diproses dan disetujui.
3. Nama Masukan : LPAD_Ver
   - Fungsi : Sebagai pengantar berkas hasil verifikasi Pbk untuk diproses dan disetujui.
   - Sumber : Waskon

Media : Kertas.
Rangkap : 1 (dua) lembar
Frekuensi : Setiap Penelitian
Keterangan : Dokumen pengantar hasil verifikasi berkas permohonan Pbk untuk diproses & disetujui.

4. Nama Masukan : Persetujuan/Penolakan_Pbk
Fungsi : Sebagai bukti persetujuan/penolakan Pbk oleh Kepala KPP
Sumber : Kepala KPP.
Media : Komputer.
Rangkap : -
Frekuensi : Setiap persetujuan.
Keterangan : Input hasil persetujuan hasil penelitian Pbk.

5. Nama Masukan : Hasil_Persetujuan
Fungsi : Hasil Persetujuan atau penolakan Pbk.
Sumber : Kepala Kantor.
Media : Komputer.
Rangkap : -
Frekuensi : Setiap persetujuan atas permohonan Pbk.
Keterangan : Hasil Persetujuan yang siap dicetak bukti Pbk nya.

3.5.2 Analisis Proses

1. Nama Proses : SIDJP Pelayanan.
Masukan : Surat_Permohonan_Pbk, Hasil_Persetujuan D_LPAD, D_Permohonan.
Keluaran : Surat_Permohonan_Pbk, LPAD, BPS D_LPAD, D_Permohonan.
Ringkasan Proses : Proses input data permohonan Pbk dan diteruskan kepada seksi Waskon untuk proses Pbk sampai disetujui Kepala KPP dan dicetak.

2. Nama Proses : SIDJP Pengawasan.

Masukan	: Surat_Permohonan_Pbk_Ver, LPAD_Ver D_LPAD, D_Pbk.
Keluaran	: Konsep_Bukti_Pbk, Uraian_Penelitian_Pbk, D_LPAD, D_Pbk
Ringkasan Proses	: Proses input hasil penelitan Pbk berupa Uraian penelitian Pbk dan Konsep Bukti Pbk untuk disetujui oleh Kepala Kantor.

3. Nama Proses : SIDJP Kepala KPP.

Masukan	: Persetujuan/Penolakan_Pbk.
Keluaran	: Hasil_Persetujuan.
Ringkasan Proses	: Proses input persetujuan hasil penelitan Pbk.

3.5.3 Analisis Keluaran

Output dari sistem ini adalah

1. Nama Keluaran : BPS

Fungsi	: Sebagai tanda bukti penerimaan surat-surat permohonan Pbk.
Media	: Kertas.
Rangkap	: 1 (satu) lembar.
Frekuensi	: Setiap penyampain surat permohonan Pbk yang dilakukan Wajib Pajak.
Deskripsi	: Surat yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti penerimaan surat permohonan pemindahbukuan pajak.

2. Nama Keluaran : Surat_Permohonan_Pbk & LPAD.

Fungsi	: Lembar untuk pengawasan surat permohonan Pbk yang masuk untuk diproses lebih lanjut di seksi terkait, sekaligus sebagai pengantar surat permohonan Pbk.
Media	: Kertas.
Rangkap	: 1 (satu) lembar.

Frekuensi : Setiap penyampain surat permohonan Pbk yang dilakukan Wajib Pajak.

Deskripsi : Surat yang dikeluarakan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk diteruskan kepada seksi terkait sebagai pengantar untuk dilakukan proses selanjutnya.

3. Nama Keluaran : Konsep_Bukti_

Fungsi : Konsep bukti Pbk yang siap disetujui.

Media : Kertas.

Rangkap : 1 (satu) lembar.

Frekuensi : Setiap selesai proses penelitian Pbk.

Deskripsi : Surat yang dipakai sebagai konsep Pbk untuk disetujui Kepala KPP.

4. Nama Keluaran : Uraian_Penelitian_ Pbk

Fungsi : Sebagai hasil uraian dari penelitian Pbk untuk disetujui.

Media : Kertas.

Rangkap : 1 (satu) lembar.

Frekuensi : Setiap selesai proses penelitian Pbk.

Deskripsi : Surat yang dipakai sebagai hasil penelitian Pbk untuk disetujui Kepala KPP.

5. Nama Keluaran : Bukti Pbk/Penolakan (Tembusan)

Fungsi : Sebagai tanda bukti persetujuan/penolakan Pemindahbukuan dan tembusannya.

Media : Kertas.

Rangkap : 1 (satu) lembar.

Frekuensi : Setiap selesai proses permohonan Pbk.

Deskripsi : Surat yang dipakai untuk melakukan Proses pemindabukuan pajak.

6. Nama Keluaran : Hasil_Persetujuan

Fungsi : Sebagai persetujuan/penolakan Pbk untuk dilakukan pencetakan Bukti Pbk.

Media : Komputer

Rangkap : -

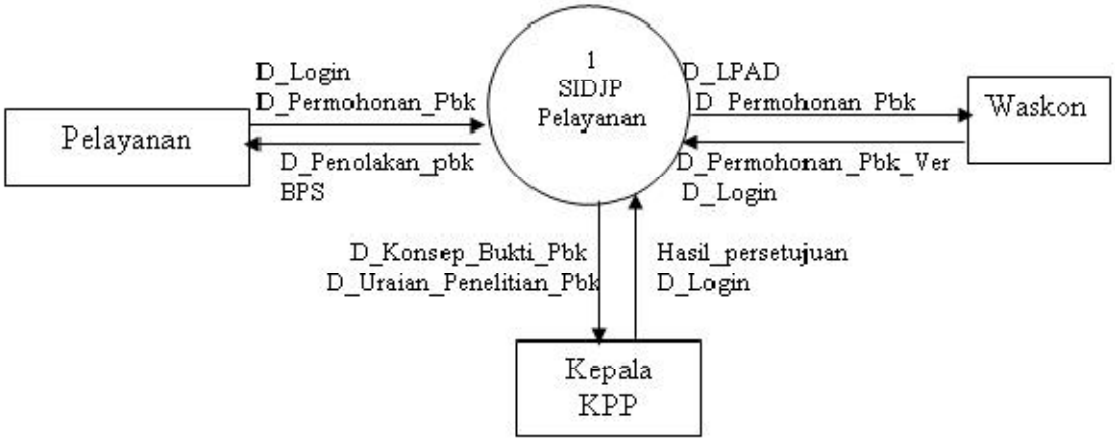
Frekuensi : Setiap selesai proses persetujuan Pbk.

Deskripsi : Hasil persetujuan yang dipakai untuk melakukan pencetakan Bukti Pbk.

3.5.4 Diagram Konteks

Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Diagram kontek akan memberi gambaran tentang keseluruhan sistem. Sistem dibatasi oleh boundary (dapat digambarkan dengan garis putus). Dalam diagram konteks hanya ada satu proses. Tidak boleh ada store dalam diagram konteks.

Diagram konteks berisi gambaran umum (secara garis besar) sistem yang akan dibuat. Secara kalimat, dapat dikatakan bahwa diagram konteks ini berisi "siapa saja yang memberi data (dan data apa saja) ke sistem, serta kepada siapa saja informasi (dan informasi apa saja) yang harus dihasilkan sistem." Pada gambar 3.2 adalah diagram kontek sistem informasi pemindahbukuan di KPP Pratama Sumedang.



Gambar 3.2 Diagram kontek Sistem Informasi Pemindahbukuan KPP

Keterangan :

SIDJP : Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak

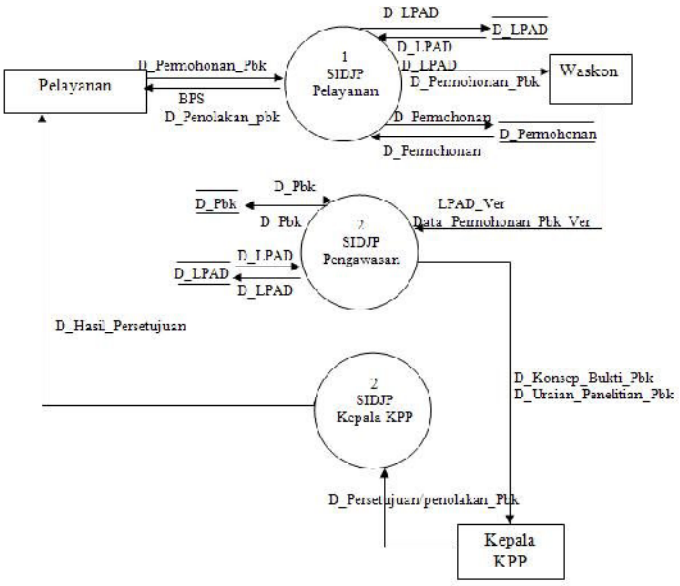
WP : Wajib Pajak

Waskon	: Pengawasan dan Konsultasi
Pbk	: Pemindahbukuan
LPAD	: Lembar Pengawasan Arus Dokumen
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
Ver	: Verifikasi

3.5.5 Diagram Level Nol

Diagram nol adalah diagram yang menggambarkan proses dari data flow diagram. Diagram nol memberikan pandangan secara menyeluruh mengenai sistem yang ditangani, menunjukkan tentang fungsi-fungsi utama atau proses yang ada, aliran data, dan eksternal entity.

Pada level ini sudah dimungkinkan adanya/digambarkannya data store yang digunakan. Untuk proses yang tidak dirinci lagi pada level selanjutnya, symbol "*" atau "P (functional primitive) dapat ditambahkan pada akhir nomor proses. Keseimbangan input dan output (balancing) antara diagram 0 dengan diagram konteks harus terpelihara. Tujuan dari diagram nol adalah untuk “memerinci” sebuah sistem menjadi “proses-proses” yang harus dilakukan ‘orang dalam.’ Atau jika dibuat dalam kalimat adalah : “Apa saja proses yang harus dilakukan agar mencapai sistem tersebut ?.” Pada gambar 3.3 diagram level 0 sistem informasi pemindahbukuan KPP Pratama Sumedang.



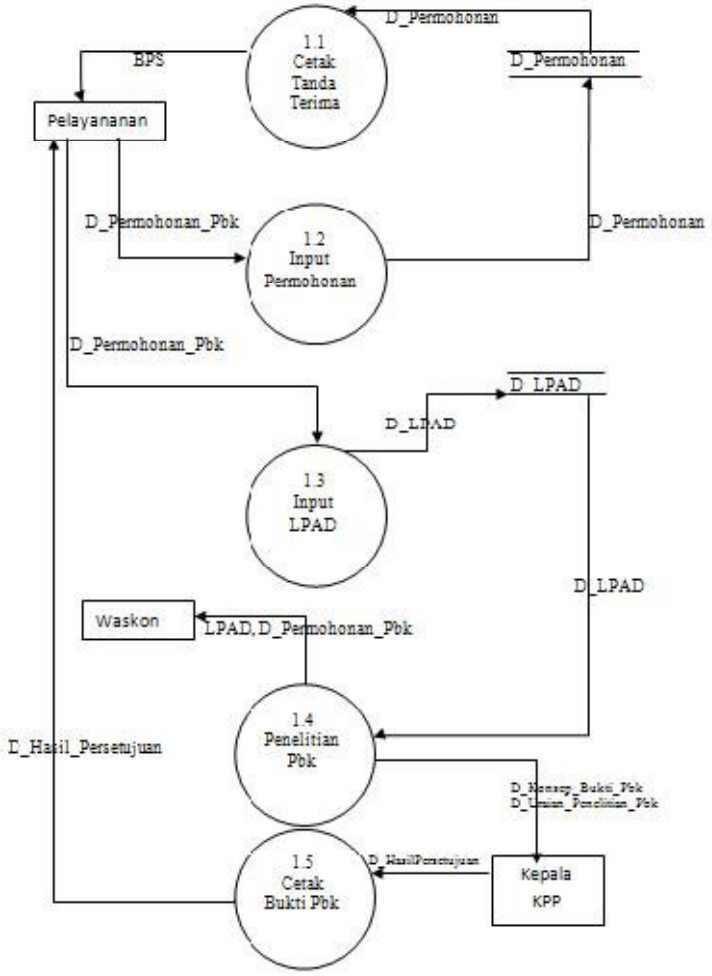
Gambar 3.3 Diagram Level 0 KPP Pratama Sumedang

Keterangan :

D_LPAD	: Data LPAD
D_Permohonan	: Data Permohonan
D_Pbk	: Data Pemindahbukuan

3.5.6 Diagram Level 1

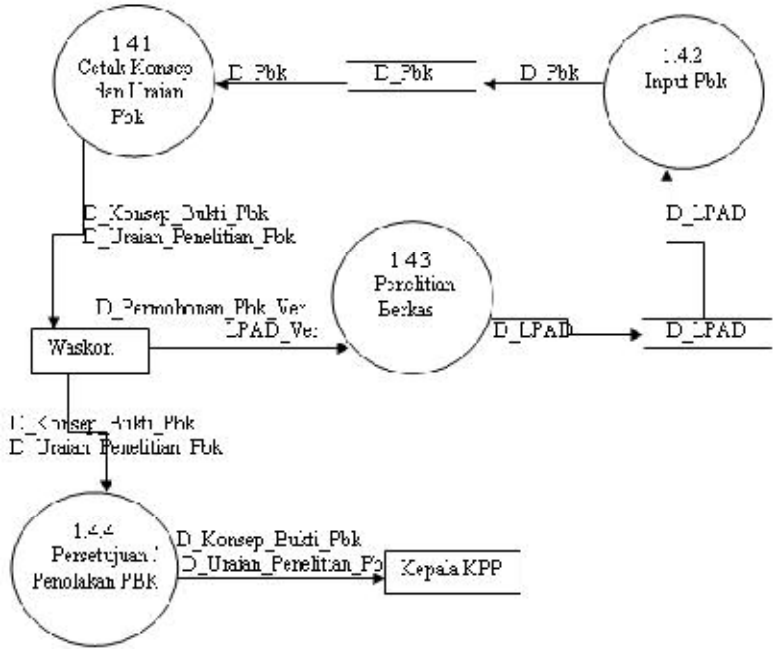
Diagram level 1 adalah diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram zero atau diagram level diatasnya. Diagram level 1 adalah diagram yang memungkinkan proses yang ada di diagram nol lebih diperinci lagi. Gambar 3.5 menggambarkan diagram rinci sistem informasi pemindahbukuan KPP Pratama Sumedang.



Gambar 3.4 Diagram Level 1 KPP Pratama Sumedang

3.5.7 Diagram Level 2

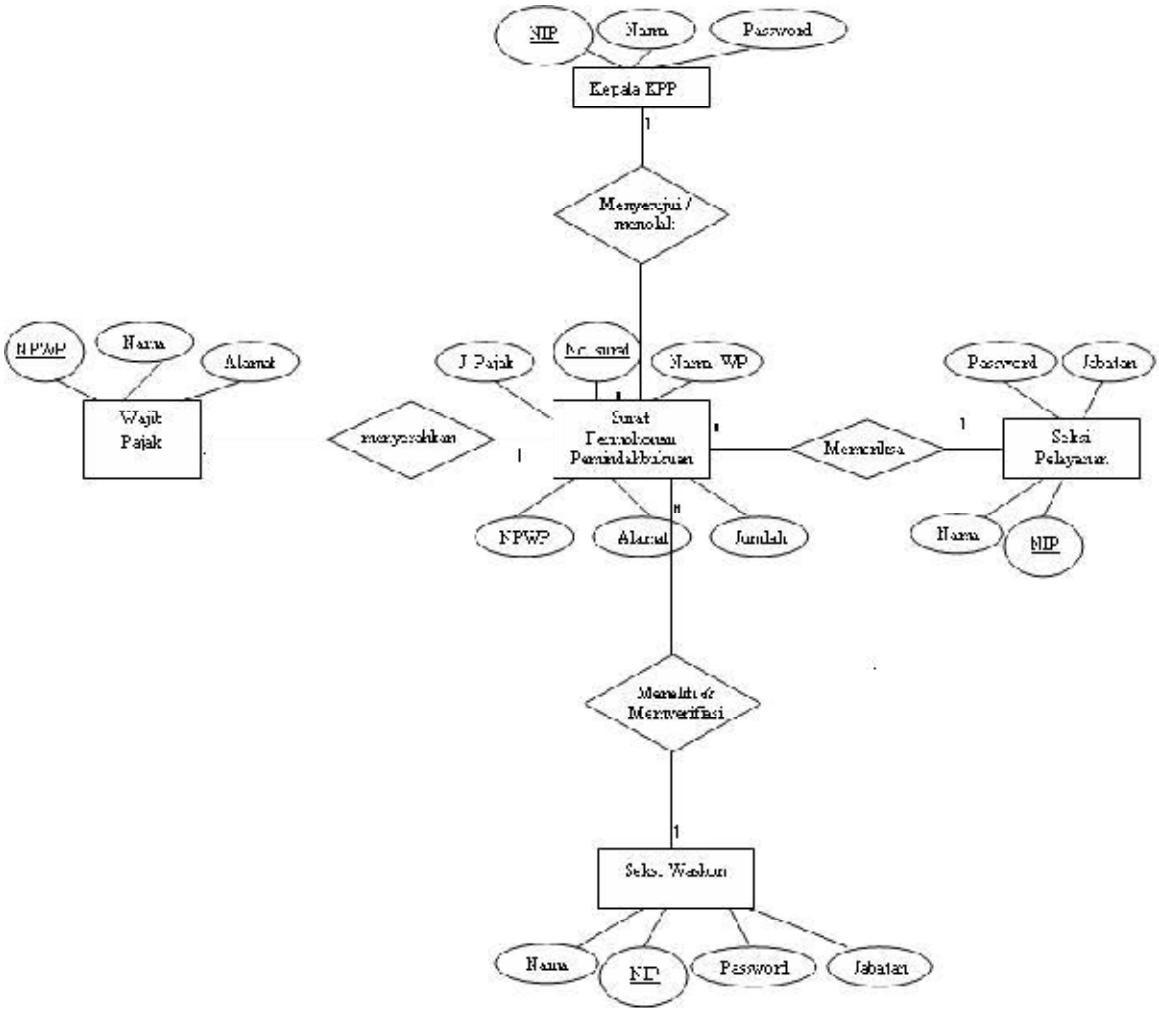
Diagram level 2 adalah diagram yang menguraikan proses apa yang ada dalam diagram level diatasnya. Diagram level 2 adalah diagram yang memungkinkan proses yang ada di diagram level satu lebih diperinci lagi. Gambar 3.6 menggambarkan diagram rinci sistem informasi pemindahbukuan KPP Pratama Sumedang.



Gambar 3.5 Diagram Level 2 KPP Pratama Sumedang

3.6 Analisis Basis Data (ERD)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Sumedang, basis data Sistem Informasi Pemindahbukuan terintegrasi dengan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) yang berada di kantor pusat Direktorat Jendral Pajak.



Gambar 3.6 ERD Sistem Informasi Pemindahbukuan KPP Pratama Sumedang

a. Jaringan Semantik

Wajib_Pajak (NPWP, Nama, Alamat)

Surat_Permohonan_Pemindahbukuan (No_Surat, Nama_WP, J_Pajak, Jumlah, Alamat, NPWP, Alamat)

Seksi_Pelayanan (NIP, Nama, Password, Jabatan)

Seksi_Waskon (NIP, Nama, Password, Jabatan)

Kepala_KPP (NIP, Nama, Password)

b. Permasalahan yang dihadapi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Sumedang, sampai saat ini belum terjadi permasalahan dengan sistem basis data sistem informasi pemindahbukuan dikarenakan :

1) Struktur data yang ada pada sistem informasi pemindahbukuan telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP).
2) Direktorat Jendral Pajak memiliki basis data *content preparation.*

3.7 Evaluasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Pemindahbukuan di KPP Pratama Sumedang maka ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, diantaranya adalah:

1. Alur proses pemindahbukuan di KPP Pratama Sumedang sudah sesuai dengan SOP Direktorat Jendral Pajak.
2. Spesifikasi *hardware* yang ada untuk menjalankan Sistem Informasi Pemindahbukuan perlu di *upgrade* untuk meningkatkan kinerja.
3. Spesifikasi *software* yang digunakan saat ini perlu diperbaharui untuk membuka *file-file* yang tidak bisa dibuka pada *software* lama.
4. Spesifikasi *brainware* saat ini perlu diberikan pelatihan menggunakan sistem informasi untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi kesalahan (*human error*) dalam proses pemindahbukuan.
5. Jaringan yang digunakan saat ini perlu ditingkatkan kecepatan aksesnya untuk mempercepat proses pemindahbukuan pada Sistem Informasi Pemindahbukuan disaat beban kerja tinggi.
6. Basis data yang digunakan pada pada Sistem Informasi Pemindahbukuan telah baik karena terintegrasi dengan SIDJP pusat sehingga jika terjadi kesalahan dapat segera diperbaiki.